

Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1)

Fajar Prastiko

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : prastikoo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dalam pelayanan pembuatan kartu tanda pencari kerja (AK 1). Judul skripsi diangkat berdasarkan permasalahan kinerja pelayanan pembuatan AK 1 yang dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis domain. Lokasi penelitian ialah kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya. Subjek penelitian ialah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Petugas Layanan, dan pencari kerja yang mengurus pembuatan kartu AK 1. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kinerja pelayanan yang diberikan oleh Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dikarenakan sarana prasarana yang kurang memadai, seringnya terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan AK 1, kurangnya tenaga pegawai khusus dalam pelaksanaan pelayanan AK 1, dan pegawai belum sepenuhnya disiplin. Untuk itu, rekomendasinya adalah dengan meningkatkan kinerja fasilitas operasional dengan memperbaiki alat-alat operasional, menyediakan ruangan khusus pelayanan dan sarana prasarana pendukung layanan yang satandar. Kemudian melakukan rekrutmen pegawai khusus sebagai petugas layanan atau Pengantar Kerja dari pegawai Negeri Sipil dan juga dengan meningkatkan disiplin pegawai dengan penerapan sanksi tegas dan absen elektronik.

Kata kunci: kinerja, pelayanan, kartu AK 1

Abstract

This study aims to describe the performance of Social Affairs, Manpower and Transmigration Kubu Raya regency in making service cards jobseekers (AK 1). Title essay concerns issued by AK 1 manufacturing service performance conducted by Field Workforce Training and Placement, Department of Social, Manpower and Transmigration Kubu Raya regency

This study uses a qualitative descriptive approach. Techniques of data collection is by interview, observation and document study. Analysis using domain analysis techniques. Location of the study is the Social Service Office, Manpower and Transmigration Kubu Raya regency. Research subject is the Head of Department, Head of Workforce Training and Placement, Placement Head and Workforce Expansion, Head Productivity Improvement Training and Labour, the Task Service, and job seekers who manage card manufacturing AK 1.

Conclusions in this study are not optimal service performance given by Field Workforce Training and Placement due to lack of adequate infrastructure facilities, often a technical disruption in service implementation manufacture AK 1, lack of energy ministry officials in the implementation of specific AK 1, and officials have yet to fully disciplines. Therefore, the recommendation is to improve the operational performance of the facility by improving operational tools, provide room service and facilities support services satandar infrastructures. Then perform specialized recruitment services as officers or employees of the Work Introduction to Civil and also to increase the discipline with the application of strict punishment and electronic absent

Keywords: performance, service, card AK 1

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Digulirkannya otonomi daerah di Indonesia menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan perubahan dan pembenahan dalam berbagai sistem yang ada. Perubahan dan pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan keterbukaan informasi saat ini. Masyarakat yang dulunya tidak terlalu peduli dengan kinerja pemerintah, sekarang mulai peduli dan semakin kritis seiring dengan kekuatan masyarakat akibat demokrasi yang telah memperkuat posisi masyarakat saat ini sehingga mampu mendorong proses keterbukaan di pemerintah terutama pemerintah daerah. Masyarakat kini menuntut hak asasi manusia sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah, sehingga pemerintah harus menyesuaikan diri dan menjawab tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu.

Mengingat salah satu fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tercipta pelayanan prima.

Setiap pemerintahan negara dapat dipastikan memiliki instansi yang tugasnya mengurus ketenagakerjaan secara nasional dengan berbagai nama instansi tersebut, baik dikenal dengan nama Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perburuhan, Departemen Sumber Daya Manusia atau nomenklatur lain dengan cakupan tugas yang sejenis. Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya merupakan kantor yang juga memberikan pelayanan ketenagakerjaan,

salah satunya sebagai penyedia Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1).

Kartu AK 1 merupakan salah satu syarat untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi baik negeri maupun swasta. Hal ini karena berkaitan erat dengan proses pengambilan kebijakan terhadap masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran dan lain-lain. Saat ini pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pembuatan kartu AK 1 ini. Pembuatan AK 1 yang semula manual atau tulis tangan berubah menjadi sistem online yang semuanya terkomputerisasi. Akan tetapi pada saat peneliti melakukan pre survey, peneliti melihat bahwa sering terjadi gangguan teknis pada saat pelayanan sehingga waktu yang diperlukan bahkan lebih lama daripada sistem manual yang berakibat pelayanan menjadi tidak maksimal.

Kurangnya tenaga khusus atau petugas operator penerima layanan menyebabkan apabila terjadi penumpukan para pencari kerja yang akan mengurus kartu AK 1 menyebabkan prosedur wawancara tidak terlaksana karena sempitnya waktu. Selain itu, akibat lainnya ialah pegawai lain yang ada di Bidang Pelayanan dan Penempatan mau tidak mau membantu dalam pelayanan pembuatan kartu AK 1 tersebut, sehingga mengakibatkan tugas pokok dan fungsi mereka yang sebenarnya terganggu. Hal ini dikarenakan dari 4 buah komputer operator yang tersedia, hanya ada seorang operator atau petugas penerima layanan yang melayani para pencari kerja tersebut. Selain itu juga petugas penerima

layanan tersebut bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil melainkan Pegawai Kontrak.

Letak loket pelayanan atau ruang operator yang menyatu dengan ruang Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, menjadi masalah lain yang timbul dan mengganggu kinerja dari pimpinan bidang tersebut. Selain itu juga belum tersedianya ruang tunggu yang nyaman di ruang pelayanan tersebut mengakibatkan para pencari kerja apabila menumpuk atau ramai pada saat musim pembukaan lapangan kerja dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, terpaksa menunggu diluar ruangan untuk antri.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah: Bagaimana Kinerja Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1) ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mendiskripsikan kinerja Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1).

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerjanya terutama Bidang Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan bidang ketenagakerjaan.

1. Kerangka Teori

a. Kinerja

Banyak literatur yang membahas mengenai kinerja dan menimbulkan berbagai macam pengertian. Beberapa ahli mengartikan kinerja sebagai sebuah *output* atau keluaran atau hasil dari suatu kegiatan. Sebagaimana yang ditulis oleh Mangkunegara (dalam Pasolong, 2007:176) mengatakan bahwa “kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. LAN-RI, (dalam Pasolong,2007:177) menyebutkan bahwa Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah diterapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (inputs) keluaran (outputs), hasil (incomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Zeithaml Parasuraman dan Berry (dalam Winarsih,2012:182) mengemukakan sepuluh indikator kinerja pelayanan yaitu :

1. **Ketampakan fisik (*Tangible*)** artinya petampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers

2. **Reliabilitas (*Reliability*)** adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.

3. **Responsivitas(*Responsiveness*)** adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

4. **Kompetensi (*Competence*)** adalah kemampuan petugas terhadap tugas dan fungsi yang diemban.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

5. **Kesopanan (*Courtesy*)** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
6. **Kredibilitas (*Credibility*)** adalah reputasi yang dimiliki oleh penyedia layanan dan petugas layanan.
7. **Keamanan (*Security*)** adalah jaminan rasa aman dalam mekanisme pelayanan yang dilakukan.
8. **Akses (*Acces*)** adalah kemudahan dalam memperoleh informasi dan menjangkau tempat layanan.
9. **Komunikasi (*Communication*)** adalah bagaimana petugas mengkomunikasikan prosedur dan mekanisme pelayanan serta menjawab keluhan dari penerima layanan.
10. **Pengertian (*Understanding the costumer*)** adalah ketanggapan terhadap kebutuhan penerima layanan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis domain. Lokasi penelitian ialah kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya. Subjek penelitian ialah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Petugas Layanan, dan pencari kerja yang mengurus pembuatan kartu AK 1.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketampakan Fisik (*Tangibles*)

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pelayanan publik, terutama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya tentu selalu ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengubah pelayanan yang dulunya manual menjadi sistem online yang sudah terkomputerisasi. Akan tetapi sekarang ini, fasilitas operasional yang ada masih belum sesuai. Hal ini dikarenakan dalam pelayanan sering mengalami gangguan teknis sehingga masih menimbulkan keluhan dari masyarakat penerima layanan. Selain itu juga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya masih belum memiliki ruang operator khusus dan ruang tunggu khusus untuk pelayanan ketenagakerjaan sehingga masih belum standar. Hal ini tak lepas juga dari bangunan kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya yang masih menumpang di Panti Jompo yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.

2. Kompetensi (*Competence*)

Saat ini masyarakat harus mampu menjawab permintaan masyarakat atas pelayanan yang prima, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memfasilitasi pegawai atau aparatur dalam mengembangkan diri mereka sehingga dapat bekerja secara profesional baik itu melalui pendidikan formal ataupun berupa bimbingan teknis. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terutama Bidang Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja belum memiliki petugas khusus dari pegawai sebagai pelaksana layanan dan masih menggunakan tenaga kontrak. Meski begitu, pegawai tenaga kontrak tersebut

dapat bekerja secara profesional karena sebelumnya sudah diberikan bimbingan teknis tentang pelayanan pembuatan AK 1.

3. Kredibilitas (Credibility)

Pemerintah harus dapat memberikan rasa aman, percaya dan reputasi yang baik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar memperkuat rasa percaya masyarakat dan pandangan baik masyarakat kepada pemerintah yang sekarang ini semakin berkurang. Salah satunya adalah dengan meningkatkan disiplin pegawai. Pegawai di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu disiplin dan tepat waktu dalam jam masuk, jam istirahat dan jam pulang kerja sehingga pekerjaan jarang sekali menumpuk dan dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu juga dalam hal pelayanan, tidak pernah pegawai pelakasa layanan pembuatan AK 1 itu memungut biaya atas pembuatan kartu AK 1 tersebut. hal ini dikarenakan hal itu memang sudah menjadi aturan dari pemerintah pusat dan juga kartu AK 1 ini dibuat bagi mereka yang mencari pekerjaan atau menganggur sehingga belum ada penghasilan. Akan semakin berat bagi masyarakat terutama pencari kerja bilamana untuk membuat kartu AK 1 memerlukan biaya, karena mereka belum berpenghasilan.

4. Akses (Acces)

Keterjangkauan akses dan informasi dari pelaksana layanan dan penerima layanan menjadi faktor penting dalam suksesnya pelayanan yang prima. Letak kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya yang letaknya di tengah pusat ibukota Kabupaten dan berada di tepi jalan besar memudahkan para penerima layanan untuk menjangkau kantor tersebut. Selain itu juga keterbukaan akses informasi juga sudah mulai diterapkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dengan menyebar brosur

dan sosialisasi kepada masyarakat seluruh kecamatan di Kabupaten Kubu Raya serta juga dengan memasang informasi di website resmi kabupaten dan kementerian ketenagakerjaan. Hal ini memudahkan masyarakat khususnya pencari kerja mendapatkan informasi tentang bagaimana membuat kartu AK 1.

5. Komunikasi (Communication)

Secara sederhana, komunikasi adalah hubungan dua orang atau lebih, masing-masing menjadi komunikan atau penerima pesan dan komunikator atau penyampai pesan. Dalam hal ini sebagai komunikator adalah petugas layanan dalam memberikan penjelasan kepada komunikan tentang apa-apa saja yang diperlukan dan syarat-syarat apa yang diperlukan untuk membuat kartu AK 1. Sejauh ini komunikasi yang tercipta cukup baik antara komunikan dan komunikator dan petugas layanan dengan profesional dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik apabila tidak terjadi gangguan. Selain itu juga komunikasi pegawai dengan pimpinan maupun dengan sesama pegawai juga terlihat baik dalam bekerjasama dalam berbagai hal.

D. Simpulan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya masih belum maksimal dan belum optimal dikarenakan sering gangguan dalam pelayanan dan tidak memiliki tempat layanan khusus seperti ruang tunggu dan loket pelayanan yang membuat penerima layanan merasa nyaman.
2. Kompetensi pegawai dilihat dari segi kepegawaian masih belum sesuai dikarenakan belum ada tenaga yang secara khusus

ditempatkan dan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, namun begitu pegawai yang ada sekarang walaupun statusnya sebagai pegawai kontrak tetapi hasil kerjanya profesional.

3. Pegawai yang ada disiplin pada saat jam kantor baik itu jam datang, jam kerja dan jam pulang kantor serta dalam pelayanan tersebut pegawai tidak pernah sekalipun melakukan pungutan liar
4. Letak kantor yang berada dipusat pemerintahan Kabupaten Kubu Raya menjadikan kantor sangat mudah dijangkau dan juga dari segi keterbukaan informasi, sudah sangat terbuka mulai dari pengumuman di papan informasi, website, dan selebaran tentang informasi ketenagakerjaan meskipun tetap ada saja pencari kerja yang masih belum tau syarat-syarat pembuatan kartu AK 1
5. Tercipta komunikasi yang baik, baik itu antar pegawai, antar pegawai dengan atasan dan pegawai dengan penerima layanan dan juga petugas layanan merespon dengan cepat apabila terjadi kesalahan dan menjelaskan dengan baik apa-apa saja informasi yang ditanyakan kepada mereka tentang pelayanan pembuatan AK 1 tersebut

E. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh dan pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan juga Seluruh Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya yang telah terlibat dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. 2011. Kabupaten Kubu Raya dalam Angka 2011. Sungai Raya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya

Fajar Prastiko

Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

Echlos, Jhon. M. dan Hassan Shadily. 1986. *Kamus Umum Bahasa Inggris- Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya. 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai 2010. Sungai Raya: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya

Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Grasindo

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Satori, Djam'an. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sianipar, JPG. 2000. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya: Diklat Prop. Dati I Jatim.

Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Timple, A. Dale. 1992. *Kinerja*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Tohardi, Ahmad (Ed). 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak: Prodi IP FISIP UNTAN.

-----,2010. *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

-----,2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Bandung: Mandar Maju

Umam Khaerul. 2009. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Zein, Harry Mulya. 2012.*Gerakan Reformasi Birokrasi Dari Dalam*. Tangerang: Green Komunika.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Skripsi/Tesis :

Lulita, Mega Clara. 2011. *Kinerja Birokrasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Umum di Desa Cukurgondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan*.Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

Siregar, Hendra Darmawan. 2008. *Kinerja Pemerintahan Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia)*. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FAJAR PRASTIKO
NIM / Periode lulus : E42009078/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : prastikoo@gmail.com/085252214744

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUBU
RAYA DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA
PENCARI KERJA (AK 1)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

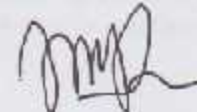
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui 3/14
Pengelola Jurnal.....


H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 26 Agustus 2013


(FAJAR PRASTIKO)